



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk upaya kami dalam mewujudkan transparansi Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, serta juga bertujuan untuk mengukur, menganalisis, dan mengetahui realiasi capaian kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Kami harap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 2022

Kepala,

H.M Syirajudin, SH, M.T
Pembina Utama Madya
NIP 19660208 198701 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

- Tugas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Secara khusus tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
 2. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.



3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
5. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembangunan Desa dan kelurahan.
6. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat.
7. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

- Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian keijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan dan sosial budaya masyarakat;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;



7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

C. Struktur Organisasi

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan;
 - b. Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - c. Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan.
4. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Desa;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan.
5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan

D. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 74 pegawai yang terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| a. Pegawai Negeri Sipil Daerah | : | 40 orang |
| b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) | : | 0 orang |
| c. Non PTT | : | 41 orang |



Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 2021 :

No		Jumlah PNS	
1	Menurut Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	
	a.	Pembina Utama Madya (golongan IV/d)	1
	b.	Pembina Tingkat I (golongan IV/b)	4
	c.	Pembina (golongan IV/a)	6
	d.	Penata Tingkat I (golongan III/d)	12
	e.	Penata (golongan III/c)	2
	f.	Penata Muda Tingkat I (golongan III/b)	8
	g.	Penata Muda (golongan III/a)	3
	h.	Pengatur Tingkat I (golongan II/d)	3
	i.	Pengatur (golongan II/c)	0
	j.	Pengatur Muda Tingkat I (gol. II/b)	0
	k.	Pengatur Muda (golongan II/a)	1
	l.	Juru Tk.I (golongan I/d)	0
		Jumlah	40
2	Menurut Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
	a.	Doktor (S3)	0
	b.	Pasca Sarjana (S2)	12
	c.	Sarjana (S1)	22
	d.	Sarjana Muda (D3)	1
	e.	SLTA	5
	f.	SLTP	0
	g.	SD	0
		Jumlah	40
3	Menurut Gender	Jumlah (orang)	
	a.	Laki-Laki	19
	b.	Perempuan	21
		Jumlah	40



Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	2	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kasubbag	-	3		3	-	-	1	2	-	-	-	-
Kasi	7	5	4	7	-	-	4	8	-	-	-	-
Jlh PNS NON-STRUKTURAL	9	10		15	4	0	1	12	1	5	-	-
Jlh Honor/ PTT	25	16	-	-	-	-	2	17	5	17	-	-
Jlh PNS + Honor/PTT	44	37	10	25	4	0	14	39	6	22	-	-



E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun aspek strategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mencakup :

- a. Peningkatan Peran lembaga usaha ekonomi masyarakat melalui peningkatan BUMDes
- b. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa melalui optimalisasi penggunaan dana desa
- c. Pembinaan kapasitas Pemerintahan desa
- d. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan.
- e. Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui pembinaan dan pengembangan desa/kampung rendah emisi.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Adapun permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam adalah sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur
2. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Beberapa hal yang menjadi masalah atau penyebab dari permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa.
2. Belum optimalnya peningkatan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa.
3. Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik.
4. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa.
5. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan kawasan perdesaan.
6. Masih tingginya Emisi GRK.



G. Sarana dan Prasarana Kerja

Guna mendukung pekerjaan sehari-hari tersedia sarana dan prasarana kerja pendukung sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	8.228	M2
2	Gedung	3	Unit (3 lantai)
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	jaringan
5	Telepon	2	jaringan
6	Area Parkir	3	area
7	Ruang Rapat	2	ruang
8	Taman	1	area
9	Masjid	1	unit

(Daftar Terlampir)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen mendukung dan melaksanakan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. V i s i

“ Berani untuk Kalimantan Timur berdaulat ”

2. M i s i

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dituju oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5. Strategi

1. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat
2. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa



3. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun desa berkualitas
4. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif
5. Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

6. Kebijakan

1. Peningkatan Bumdes yang aktif untuk meningkatkan ekonomi desa
2. Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa untuk mencapai status desa berkembang
3. Pembinaan kapasitas desa yang memiliki konsistensi perencanaan dan anggaran
4. Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
5. Pembinaan dan pengembangan Desa/Kampung rendah emisi.

7. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
10. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi



11. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah
12. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
13. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
22. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24. Pengadaan Mebel
25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
32. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
33. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
34. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
35. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
36. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
37. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
38. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan
39. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
40. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
41. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
42. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
43. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
44. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
45. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
46. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
47. Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
48. Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
49. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
50. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



51. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
52. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
53. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
54. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
55. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



B. Indikator Kinerja Utama

- 1 Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan daerah Provinsi an tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi
- 3 Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 - b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
 - c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan
 - d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kawasan perdesaan
 - e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat
 - f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, SDA dan TTG
 - g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 - h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
 - i. tugas dan fungsinya



4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Laporan (angka absolute)	Data Hasil Perhitungan Indikator Desa Membangun	DPMPD Prov.Kaltim
		2 Persentase Bumdes Aktif	$\frac{\sum \text{BUMdes Aktif}}{\sum \text{BUMdes}}$	Data Kabupaten	
		3 Persentase Desa dengan status berkembang	$\frac{\sum \text{Desa Berkembang}}{\sum \text{Desa}}$	Data Hasil Perhitungan Indikator Desa Membangun	
		4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	$\frac{\sum \text{Desa /Kelurahan yang dibina}}{\sum \text{Desa /Kelurahan}}$	Data Kabupaten	



		5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	$\frac{\sum \text{Lembaga Aktif}}{\sum \text{Lembaga}}$	Data Kabupaten	
		6 Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	$\frac{\sum \text{Desa Kampung Iklim}}{\sum \text{Desa Kampung Iklim}}$	Data Kabupaten	

Samarinda, Januari 2021

Kepala

H.M. Syirajudin, SH, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003



C. PERJANJIAN KINERJA

SASARAN			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 30
	2 Persentase BUMDesa Aktif	BUMdes Aktif	TW 1 : 5 TW 2 : 7 TW 3 : 8 TW 4 : 10
	3 Persentase Desa dengan Status berkembang	Desa berkembang	TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 30
	4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan		TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 30
	5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif		TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 0 TW 4 : 30
	6 Persentase Desa yang menjadi kampung iklim		TW 1 : 0 TW 2 : 0 TW 3 : 7 TW 4 : 28



1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 19.898.636.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 9.244.018.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) Belanja Langsung sebesar Rp. 10.093.358.000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan Belanja Modal Rp. 561.260.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 18.425.133.203,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) atau sebesar 92.59 % dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.269.936.513,- (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) atau sebesar 89.46 %. dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.606.926.822,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95.18% dan realisasi Belanja Modal Rp. 546.207.708,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau sebesar 97.32%.

2. Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.244.018.000,-	Rp. 8.269.936.513,-	89.46
2	Belanja Langsung	Rp. 10.093.358.000,-	Rp. 9.606.926.822,-	95.18
3	Belanja Modal	Rp. 561.260.000,-	Rp. 546.207.708,-	97.32
	Jumlah	Rp. 19.898.636.000,-	Rp. 18.425.133.203,-	92.59



3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 5.622.415.500,-	Rp. 5.274.409.642	93.80%



B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30 %	21.07	21.82
2	Pengukuran Kinerja	25 %	15.94	15.94
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10.24	10.07
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6.85	6.06
5	Capaian Kinerja	20 %	11.50	9.94
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	65.78	63.82
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 63.82 (Enam Puluh Tiga koma Delapan Puluh Dua) dengan predikat penilaian "B". Dari segi pencapaian mengalami penurunan capaian nilai sebesar 1.96 (satu koma Sembilan puluh enam)

2. Tindak lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

No	Rekomendasi		Tindak lanjut/Rencana Aksi	Sudah/Belum
1	<p>Terhadap hasil evaluasi atas perencanaan kinerja dari pemenuhannya telah memadai namun masih memerlukan perbaikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat dokumen RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebagai Target Kerja Tahunan 	1	<p>Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan kinerja berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat dokumen RKT (Rencana Kinerja Tahunan) - Lebih meningkatkan kualitas dokumen RKT dengan memperhatikan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan Indikator Kinerja sasaran dan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤Telah memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan P Renstra ➤Sudah membuat capaian Kinerja melalui laporan renaksi secara perbulan dan pertriwulan



<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan kualitas dokumen rencana kerja tahunan dalam hal:<ol style="list-style-type: none">1) Menetapkan Indikator kinerja sasaran dan program yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik2) Target kinerja ditetapkan dengan baik3) Menyusun kegiatan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan didukung oleh anggaran yang memadai4) Dokumen PK selaras dengan RPJMD/renstra dan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).▪ Memanfaatkan dokumen Renstra/RKT/PK untuk :<ol style="list-style-type: none">1) Memonitor capaian target jangka menengah sampai tahun berjalan dan sebagai dasar mengukur keberhasilan2) Memonitor rencana aksi atas dokumen PK (Perjanjian Kinerja)	<p>Program kinerja serta target kinerja yang baik</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun kegiatan dengan menyesuaikan sasaran, indikator, target sesuai dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan menyesuaikan anggaran yang tersedia➤ Menyelaraskan Dokumen PK sesuai dengan RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan➤ Membuat capaian kinerja secara perbulan dan pertriwulan untuk memonitor renaksi atas dokumen PK yang telah diperjanjikan	
--	--	--



	sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, penyusunan (identifikasi) kinerja sampai tingkat eselon III dan IV serta mencantumkan target secara priodik atas kinerja			
2	Terhadap dokumen pengukuran kinerja agar : ➤ Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dalam hal : 1) Pengukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi / atasannya dan dilakukan secara berjenjang sampai dengan level staf dan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. 2) Pengukuran Kinerja dilakukan secara berjenjang dan dikembangkan menggunakan teknologi informasi 3) Membangun dan melakukan	2	Terhadap dokumen pengukuran kinerja : ➤ Akan mengingatkan kembali kepada Eselon III dan IV melalui rapat pejabat struktural agar dalam hal pengukuran kinerja harus selaras dan mengacu kepada IKU - Akan meupayakan teknologi informasi untuk pengukuran (indikator) kinerja secara berjenjang ➤ Akan membangun pengumpulan data kinerja secara berkala (Triwulan) berdasarkan Rencana Aksi yang telah ditetapkan dengan Surat/Nota Dinas Kepala DPMPD Prov.Kaltim dan menggagendakan rapat	➤ Sudah membuat dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja ➤ Sudah membuat Indikator Kinerja Individu ➤ Sudah membuat Laporan Kinerja Per Triwulan



	<p>pengumpulan data kinerja berdasarkan mekanisme yang memadai dan erstruktur (Jelas metode pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan, mencatat, melakukan supervise dan berasal dari sumber data yang valid).</p> <p>➤ Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran dan dasar pemberian reward dan punishment sehingga dapat digunakan untuk pengendalian dan pemanfaatan kinerja secara berkala.</p>		<p>evaluasi kineja secara berkala (Triwulan) serta penunjukan Pejabat Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Program sebagai penanggungjawab pengumpulan data.</p> <p>- Akan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja dalam perencanaan dan penganggaran serta dasar pemberian rewarad dan punishment</p>	
3	<p>Terhadap hasil evaluasi atas pelaporan kinerja agar :</p> <p>➤ Meningkatkan pemenuhan laporan kinerja terkait penyajian informasi mengenai pencapaian IKU</p> <p>➤ Meningkatkan kualitas laporan kinerja terkait penyajian informasi</p> <p>1) Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan</p>	3	<p>Terhadap hasil evaluasi atas pelaporan kinerja :</p> <p>➤ Telah berupaya semaksimal untuk meningkatkan kualitas Pelaporan Kinerja dengan memperhatikan</p> <p>1) Pencapaian target di IKU</p> <p>2) Membuat Nota dinas tertanggal 7 Desember 2021 perihaluntuk mengevaluasi dan menganalisis capaian</p>	Sudah membuat analisis capaian kinerja



	<p>pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan</p> <p>2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan pada pencapaian sasaran kinerja dan informasi kinerja yang andal</p> <p>➤ Memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja untuk umpan balik (feedback) perbaikan terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja organisasi dengan informasi kinerja yang dapat diandalkan</p>		<p>kinerja masing-masing IKU, dengan memperhatikan target, capaian target disertai dengan data-data yang telah tersedia</p> <p>3) Untuk kedepannya lebih memperhatikan target dan anggaran yang telah ditetapkan guna pencapaian / meningkatkan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan</p>	
4	<p>Terhadap hasil evaluasi atas evaluasi internal agar :</p> <p>➤ Meningkatkan hasil evaluasi program untuk dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga</p>	4	<p>Terhadap hasil evaluasi atas evaluasi internal :</p> <p>- Pimpinan akan melakukan komunikasi internal / rapat kepada seluruh pejabat struktural setiap bulan /Pertriwulan terkait sejauh mana pencapaian target</p>	<p>Sudah membuat dokumen rencana aksi beserta realisasi dari rencana aksi</p>



	<p>memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Melakukan pemantauan atas rencana Aksi dalam rangka pengendalian dan alternative perbaikan kinerja setiap periode➤ Hasil evaluasi internal digunakan untuk penilaian keberhasilan program yang terdokumentasi, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi sebagai perbaikan kinerja selanjutnya		<p>kinerja yang telah ditetapkan didalam PK, memantau renaksi yang telah dibuat, serta menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan guna pencapaian target kinerja.</p>	
5	<p>Terhadap hasil evaluasi atas capaian sasaran/kinerja organisasi agar dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan (output ataupun outcome) untuk tetap mengupayakan peningkatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara optimal, dengan target yang terukur sehingga dapat dicapai.</p>	5	<p>Terhadap hasil evaluasi atas capaian sasaran/kinerja organisasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Membuat laporan capain kinerja berupa outcome dan output yang ditujukan kepada seluruh pejabat struktural dan menyampaikan secara berjenjang kepada pimpinan	<p>Sudah Membuat dokumen Rencana Aksi dan realisasi rencana aksi Outcome dan Output.</p>



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRI WULANAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	30	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	30	27	90
		2 Persentase Bumdesa Aktif	Persentase		Triwulan I	5	5	100
					Triwulan II	7	7	100
					Triwulan III	8	8	100
					Triwulan IV	10	10	100
		3 Persentase dengan status desa berkembang	Persentase		Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	30	27	90



		4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	Persentase		Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	30	30	100
		5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif	Persentase		Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	30	30	100
		6 Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase		Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III	7	7	100
					Triwulan IV	28	28	100

**C. Analisis Capaian Kinerja.****Sasaran : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	448 (30)	421 (27)	93,97 90
2.	Persentase Bumdesa Aktif	Persentase	6.20	6.20	100
3.	Persentase Desa dengan status berkembang	Persentase	6.20	5.57	90
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkembang	Persentase	6.20	6.20	100
5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Persentase	6.20	6.20	100
6.	Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase	35	35	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1	2	3	5	6	7
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	484 (19)	421 (27)	86.98% 90
2.	Persentase Bumdesa Aktif	Persentase	360 25	390 (30)	100
3.	Persentase Desa dengan status berkembang	Persentase	329 (19)	356 (27)	90
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkembang	Persentase	363 (25)	393 (30)	100



5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Persentase	363 (25)	393 (30)	100
6.	Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase	40	35 (35)	100

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	5	6	7
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	368 (45)	421 (27)	114
2.	Persentase Bumdesa Aktif	Persentase	470 (45)	390 (30)	82.97
3.	Persentase Desa dengan status berkembang	Persentase	439 (45)	356 (27)	81.09
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkembang	Persentase	473 (45)	393 (30)	83.08
5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Persentase	473 (45)	393 (30)	83.08
6.	Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase	45	35 (35)	100

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Dari hasil realisasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan " tidak semua tercapai sesuai yang ditargetkan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal** diungkit berdasarkan hasil dari seluruh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2021 dari target 30 Desa terealisasi 27 Desa atau terealisasi secara persentase 90 %, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1
Target dan Realisasi
Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Tahun 2021

NO	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2020	Ket
1	5	7	9	15	
1	Paser	Muara Samu	Luan	Berkembang	Tercapai
2	Paser	Muara Samu	Libur Dinding	Berkembang	Tercapai
3	Paser	Muara Samu	Biu	Berkembang	Tercapai
4	Paser	Muara Samu	Suweto	Berkembang	Tercapai
5	Paser	Muara Komam	Long Sayo	Berkembang	Tercapai
6	Paser	Muara Komam	Prayon	Berkembang	Tercapai
7	Paser	Muara Komam	Binagon	Berkembang	Tercapai
8	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Menamang Kiri	Tertinggal	Tidak Tercapai
9	Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Sedulang	Berkembang	Tercapai
10	Kutai Kartanegara	Marang Kayu	Sambera Baru	Berkembang	Tercapai
11	Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Wonosari	Berkembang	Tercapai
12	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	Jonggon Desa	Berkembang	Tercapai
13	Kutai Timur	Telen	Lung Melah	Berkembang	Tercapai
14	Kutai Timur	Bengalon	Sekerat	Maju	Tercapai
15	Kutai Timur	Bengalon	Sepaso Selatan	Berkembang	Tercapai
16	Kutai Timur	Bengalon	Tebangan Lembak	Tertinggal	Tidak Tercapai
17	Kutai Timur	Karangan	Batu Lepoq	Berkembang	Tercapai
18	Kutai Timur	Karangan	Baay	Berkembang	Tercapai
19	Kutai Timur	Batu Ampar	Himba Lestari	Berkembang	Tercapai
20	Kutai Barat	Penyinggahan	Bakung	Berkembang	Tercapai
21	Kutai Barat	Damai	Lumpat Dahuq	Berkembang	Tercapai
22	Kutai Barat	Bongan	Siram Jaya	Berkembang	Tercapai
23	Kutai Barat	Bongan	Siram Makmur	Berkembang	Tercapai
24	Kutai Barat	Mook Manaar Bulatn	Linggang Muara Batuq	Berkembang	Tercapai
25	Kutai Barat	Mook Manaar Bulatn	Muyub Ulu	Berkembang	Tercapai
26	Kutai Barat	Tering	Tondoh	Berkembang	Tercapai
27	Mahakam Ulu	Long Pahangai	Delang Kerohong	Berkembang	Tercapai
28	Mahakam Ulu	Long Pahangai	Long Pakaq Baru	Berkembang	Tercapai
29	Mahakam Ulu	Long Pahangai	Lirung Ubing	Berkembang	Tercapai
30	Mahakam Ulu	Long Hubung	Long Hubung Ulu	Tertinggal	Tidak Tercapai

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan untuk tahun 2021 target Jumlah Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya akan ditingkatkan menjadi desa berkembang berjumlah 30 Desa dan yang naik statusnya atau terealisasi berjumlah 27 Desa (Tabel warna merah tidak naik statusnya).

- Keberhasilan / kegagalan :
 - Secara garis besar untuk indikator Kinerja Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat tertinggal setiap tahunnya terus mengalami peningkatan tidak terjadi penurunan walaupun untuk tahun 2021 tidak tercapai secara keseluruhan dari yang ditargetkan sejumlah 30 Desa hanya terealisasi 27 Desa. Hal ini disebabkan :
 - Postur Anggaran yang minim
 - Susahnya Aksesibilitas menuju desa (jalan, listrik, telekomunikasi dll)
 - belum meratanya kualitas pembangunan di wilayah perdesaan.
 - Kurangnya Sinergitas antar OPD Terkait, karena untuk menaikkan status IDM suatu Desa tidak hanya kerja dari DPMPD saja, tetapi perlu peran aktif dari OPD terkait



- Indikator penilaian IDM bertumpu pada Indikator Kemendes PDTT RI yang seluruh Indonesia diberlakukan sama sehingga untuk mengukur kemampuan menaikkan status desa sangat susah, untuk itu DPMPD Provinsi Kaltim harus memiliki Indikator Penilaian IDM tersendiri menyesuaikan dengan kondisi geografis Desa di Kalimantan Timur.
- Peningkatan/Penurunan
Sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun untuk meningkatkan status desa berkembang yaitu 150 Desa (2019-2023), telah mengalami peningkatan di mana Tahun 2019 dari yang telah ditargetkan 15 Desa tercapai 15 Desa (100%), di tahun 2020 juga mengalami peningkatan walaupun hanya tercapai 19 Desa (76%). Penyebab tahun 2021 tidak sepenuhnya tercapai dikarenakan di tahun anggaran 2021 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami refocusing anggaran yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing-masing organisasi perangkat daerah, dan hal ini tentunya juga sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun. Selain itu Hasil dari analisis 3 Desa yang tidak naik statusnya menjadi desa berkembang dikarenakan dari hasil perhitungan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan bahwa nilai komposit Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) berada dirata rata dinilai 0,5375, 0,5729 dan 0,5965 sedangkan untuk skor yang diperlukan di tahun 2021 untuk menaikkan status IDM adalah 0,6770
- Alternatif/Solusi :
 1. Berada dalam situasi seperti ini maka diperlukan strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu mendapatkan hasil atau target yang maksimal. Peningkatan koordinasi dengan jajaran Dinas PMD Kabupaten, serta mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan status IDM.
 2. Tetap memberikan dukungan kegiatan bagi Desa yang belum naik status IDM nya dan tetap menargetkan di tahun berikutnya, sehingga 3 Desa yang belum naik status IDM nya kedepannya telah berhasil meningkat status IDM nya.
 3. Berharap di tahun berikutnya tidak terjadi pengurangan ataupun refocusing anggaran, dan seharusnya ada penambahan dukungan anggaran.
 4. Melibatkan berbagai sektor, pihak ataupun Instansi diluar dari DPMPD sebagai team work yang mampu membantu menaikkan status IDM.
 5. Berupaya kedepannya DPMPD Provinsi Kaltim memiliki penyesuaian Indikator untuk penilaian IDM tentunya harus melalui peraturan yang berlaku, dan untuk itu perlu dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan untuk penilaian IDM.



2. **Indikator Kinerja Persentase Bumdes Aktif**, sesuai dengan Target RPJMD DPMPD Prov.Kaltim tahun 2021 sebanyak 30 Desa. Untuk Indikator Persentase BUMDesa Aktif berada di bawah Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Bidang ini bertanggungjawab atas Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa, Adapun hasil dari Persentase BUMdesa Aktif adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi BUMDesa Aktif Tahun 2021

No	Nama Desa	Nama BUMDes/BUMK	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Usaha
1	Sedulang	Harapan Etam Sedulang	Kota Bangun	Kutai Kartanegara	Perikanan dan Pertanian
2	Wonosari	Sumber Rejeki	Kota Bangun	Kutai Kartanegara	Pertanian,Perdagangan dan Perternakan
3	Sambera Baru	Sambera Sejahtera	Marangkayu	Kutai Kartanegara	Agen tabung Gas,Pengelolaan Air Minum
4	Jonggon Desa	Harapan Jaya	Loa Kulu	Kutai Kartanegara	Jasa
5	Menamang Kiri	-	Muara Muntai	Kutai Kartanegara	On Proses
6	Tembagan Lembak	Ulun Lembak Mandiri	Bengalon	Kutai Timur	Meubelair
7	Sepaso Selatan	Makmur Sejahtera	Bengalon	Kutai Timur	Toko Tani,Earana Pengelolaan Air Bersih,Tabung Gas
8	Sekerat	Sekerat Jaya Mandiri	Bengalon	Kutai Timur	Listrik Desa, Air Bersih
9	Lung Melan	Lung Melah	Telen	Kutai Timur	Kebun Sawit
10	Batu Lepoq	Batu Lepoq	Karangan	Kutai Timur	Kebun Sawit
11	Baay	Ba,ay	Karangan	Kutai Timur	Kebun Sawit
12	Himba Lestari	Maju Bersama	Batu Ampar	Kutai Timur	Usaha Layangan Umum
13	Luan	Luan Jaya	Muara Samu	Paser	Wisata, BRI Link, Bank Sampah
14	Biu	Usaha Mandiri	Muara Samu	Paser	Pengelolaan Limbah
15	Libur Dinding	Tepian Gedong	Muara Samu	Paser	Simpan Pinjam, Sapordi, Bengkel
16	Suweto	Rimba Mulya	Muara Samu	Paser	Simpan Pinjam,Bengkel,Pertukangan
17	Long Sayo	Seleloy	Muara Komam	Paser	Bengkel,Pertukangan
18	Prayon	Usaha Taka	Muara Komam	Paser	Simpan Pinjam,LPG
19	Binagon	Bina Tani	Muara Komam	Paser	Simpan Pinjam
20	Linggamg Muara Batuq	Muara Batuq	Mook Manaar Bulant	Kutai Barat	Sarang Burung Walet
21	Tondoh	Kampung Tondoh	Mook Manaar Bulant	Kutai Barat	Sarang Burung Walet
22	Bakung	Kampung Bakung	Penyinggahan	Kutai Barat	Keramba/perikanan,palawija, sarang wallet
23	Lumpat Dahuq	Lumpat Dahuq	Damai	Kutai Barat	Simpan Pinjam
24	Siram Jaya	Bangun Sejahtera	Bongan	Kutai Barat	Perkebunan Kelapa Sawit, Pengadaan Pupuk dan Sapordi
25	Siram Makmur	Siram Makmur	Bongan	Kutai Barat	Jasa Penyewaan
26	Muyub Ulu	Muyub Mandiri	Tering	Kutai Barat	Pertanian,Sembako dan Jasa



27	Delang Kerohong	BOOT Urip	Long Pahangai	Mahakam Ulu	Pertanian Padi Gunung, Sayur dan Perkebunan Kakao
28	Long Pakaq Baru	Daliq Peket	Long Pahangai	Mahakam Ulu	PLTS dan Sarana Air Bersih
29	Lirung Ubing	-	Long Pahangai	Mahakam Ulu	On Proses
30	Long Hubung	Pidang Jayaq	Long Hubung Ulu	Mahakam Ulu	Air Bersih

Dari Tabel di atas dapat dilihat Indikator Kinerja Persentase BUMDesa Aktif dengan target 30 Desa terealisasi sebanyak 30 Desa, secara persentase tercapai 100%. Selain itu untuk Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat juga memiliki kegiatan pengungkit lainnya yaitu Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun data target serta pencapaian target dari 2 (dua) sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3
Data Posyantek Aktif
Tahun 2021

No	Nama Posyantek	Kab/Kota	Desa/Kecamatan
1	Posyantek Makarti	Kutai Karatnegara	Makarti
2	Posyantek Taper	Paser	Tanah priuk
3	Posyantek Amanah	Paser	-
4	Posyantek Pelangi	Kota Bontang	Bontang Barat
5	Posyantek Kemala	Kutai Kartanegara	-
6	Posyantek Masyarakat Melak Teknologi	Kutai Barat	-
7	Posyantek Ratu Bura Daya	Paser	Bontang Selatan
8	Posyantek Guna Berkat Teknologi Kita Mandiri	Bontang	Balikpapan Barat
9	Posyantek Balikpapan	Balikpapan	Balikpapan Barat
10	Posyantek Kecamatan Bongan	Bontang	



Tabel 4
Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina
Tahun 2021

No	Desa	Kabupaten
1	Sungai Payang	Kutai Karatnegara
2	Handil Terusan	
3	Labaho Ulak	
4	Margarahayu	
5	Suka Maju	
6	Tani Harapan	
7	Mulawarman	
8	Loa Duri	
9	Karya Jaya	
10	Desa Salili	
11	Sari Nadi	
12	Sepakat	
1	Tepian Langsung	Kutai Timur
2	Danau Raden	
3	Tepian Makmur	
4	Tanjung Labu	
5	Pengadan Baru	
6	Selangkau	
7	Perupuk	
8	Manubar Dalam	
9	Tadoan	
10	Jak Luay	
11	Kandolo	
12	Beno Harapan	
13	Kombeng Indah	

- Keberhasilan/Kegagalan
 1. Tahun 2021 Bidang UEM, SDA dan TTG, khususnya Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat telah melakukan pembinaan dan monitoring dilokasi kegiatan, tingginya peran serta masyarakat, melakukan koordinasi yang baik kepada seksi BUMDesa/BUMK, pendamping profesional Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan dalam mengetahui perkembangan BUMDesa/BUMK di Kabupaten sehingga menghasilkan sasaran kegiatan yang cukup maksimal.
 2. Untuk Seksi Teknologi Tepat Guna melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Tahun 2021 telah menargetkan 10 Posyantek Aktif untuk diberikan pelatihan dan 10 Posyantek Percontohan yang dibina. Dari Target yang telah ditetapkan hanya 10 Posyantek Aktif yang tercapai sedangkan Posyantek Percontohan hanya tercapai 2 posyantek dari yang



- ditargetkan 10, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu untuk melakukan pembinaan terkendala PPKM Level 4.
3. Dari target yang ditetapkan untuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina, melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, tercapai dengan sangat baik secara persentase lebih dari 100 % dengan pencapaian target 25 Pokmas dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Pokmas.
 4. Adapun faktor lain yang menjadi penghambat didalam pelaksanaan pembinaan Pokmas dikarenakan beberapa hal yaitu:
 - Faktor Eksternal dimana kurangnya kesadaran masyarakat Desa sehingga perkembangan dan pengaktifan Kelompok Masyarakat Pengelola Prasarana dan Sarana masih rendah
 - Tidak didukungnya biaya yang memadai dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Desa terutama biaya pemeliharaan untuk sarana dan prasarana terbangun
 - Kurang tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas para kelompok masyarakat pengelola sarana dan prasarana di Desa
 - Kurangnya dukungan terkait pengembangan Desa Wisata yang sangat berpotensi untuk perbaikan ekonomi masyarakat Pasca Pandemi Covid-19
- Peningkatan/Penurunan
 1. Dari Target RPJMD yang telah ditetapkan selama 5 Tahun 2 tahun diawal telah tercapai 100 % dimana pada Tahun 2019 dari target yang ditetapkan 15 Desa tercapai 15 Desa begitupula ditahun 2020 dari target 25 Desa yang ditetapkan tercapai 25 Desa, dan di tahun 2021 dari target 30 Desa yang ditetapkan tercapai 30 Desa. Untuk Persentase BUMDesa Aktif setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
 2. Tahun 2021 terjadi Penurunan capaian target untuk Posyantek Percontohan yang dibina, namun mengalami Peningkatan untuk Posyantek aktif karena salah satu Posyantek masuk 10 Besar Nasional sebagai Posyantek Berprestasi
 3. Terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya (Tahun 2020), dimana pada tahun 2020 hanya 2 Pokmas yang berhasil dibina hal ini dikarenakan terjadinya rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan baru terlaksana secara maksimal di Tahun 2021.
 - Alternatif/Solusi :
 1. Berharap kedepannya tidak ada lagi pengurangan ataupun refocusing anggaran guna meningkatkan persentase jumlah BUMDesa Aktif.
 2. Untuk Solusi kedepannya telah dianggarkan kembali di tahun 2022, berupaya melakukan visitasi kepada BUMDesa/BUMK sehingga dapat memberikan dukungan dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa/BUMK di Kabupaten, disertai dengan adanya dukungan anggaran



yang memadai sehingga dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan ditahun yang akan datang.

3. Untuk kedepannya harus ada sosialisasi atau pelatihan terkait penilaian BUMDesa berkembang, BUMDesa bersama, guna lebih meningkatkan keberadaan dan pemanfaatan peran BUMDesa.
 4. Perlu adanya reward kepada BUMDesa yang aktif, yang terus memberikan peran dan fungsinya terhadap kemajuan perekonomian Desa.
 3. Melakukan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek Bagi Pengurus Posyantek/Posyantekdes.
 4. Melakukan Pembinaan kepada pengurus posyantek melalui workshop.
 5. Akan memberikan materi kepada pengurus pada saat melakukan monitoring dan evaluasi.
 6. Perlu terus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga mau terlibat secara aktif dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Desa.
 7. Solusi kedepannya dalam rangka pengakhiran kegiatan pamsimas, maka diharapkan pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa melalui OPD terkait bersama sama berintegrasi guna keberlanjutan Program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
 8. Perlu adanya sinergitas anggaran baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Desa untuk peningkatan kapasitas para kelompok masyarakat dan pengelola prasarana dan sarana.
 9. Sebagai daya tarik Desa wisata merupakan salah satu solusi dalam rangka perbaikan ekonomi masyarakat sesa Pasca Pandemi Covid-19, untuk itu perlu dukungan dan support terkait pengembangan Desa wisata.
3. **Indikator Kinerja Persentase Desa dengan Status berkembang**, sesuai dengan Target RPJMD DPMPD Prov.Kaltim Tahun 2021 adalah 30 Desa. Dari perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021, yang berhasil ditingkatkan statusnya dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang tercapai sebanyak 27 Desa atau 90 %, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5
Desa dengan Status Berkembang
Tahun 2021**

Tahun						Total
	Paser	Kukar	Kutim	Kubar	Mahulu	
2021	Desa Luan	Desa Menamang Kiri	Desa Lung Melah	Desa Bakung	Desa delang Kerohong	30 Desa
	Desa Libur Dinding	Desa Sedulang	Desa Sekerat	Desa Lumpat Dahuq	Desa Long Pakaq Baru	Tercapai 27 Desa



	Desa Biu	Desa Sambera Baru	Desa Seaso Selatan	Desa Siram jaya	Desa Lirung Ubing	
	Desa Suweto	Desa Wonosari	Desa Tebangan Lembak	Desa Siram makmur	Desa Long Hubung Ulu	
	Desa Long Sayo	Desa Jonggon Desa	Desa Batu Lepoq	Desa Linggang Muara Batuq		
	Desa Long Sayo		Desa Baay	Desa Muyub Ulu		
	Desa Prayon		Desa Rimba Lestari	Desa Tondoh		
	Desa Binagon					

Dari Tabel di atas dapat dilihat Indikator Kinerja Persentase Desa dengan status berkembang dengan target 30 Desa terealisasi sebanyak 27 Desa (berwarna merah tidak terealisasi). Untuk Indikator Persentase Desa dengan status berkembang berada di bawah Bidang Pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan, dengan Program Peningkatan kerjasama Desa, Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan pengungkit yaitu :

1. Fasiitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten Kota dengan Indikator sub kegiatan Jumlah Kerjasama Antar Desa yang dibina dengan target 7 BKAD, Pendamping Desa yang dibina sebanyak 50 orang pendamping desa yang dibina
2. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga dengan indikator sub kegiatan Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina target 3 Kerjsama desa
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Indikator Sub kegiatan Kawasan Perdesaan yang dibina dengan target 3 kawasan perdesaan.

Adapun data dari kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina
Tahun 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa yang bekerjasama	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Paser	Muara Samu	1. Libur Dinding	01/SKB-Kades/2017 Tentang Penetapan	✓ Kerjasama dibidang pemberdayaan masyarakat dengan unit usaha yang dilakukan simpan pinjam
			2. Luan		
			3. Suweto		
			4. Biu		



				Pengurus BKAD Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deviden hasil usaha digunakan untuk pemberdayaan masyarakat ✓ Jenis Program kerja yang dilaksanakan yaitumemberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin
2	Kutai Timur	Muara Komam	1. Binangon	Nomor 35 Tahun 2015 Tentang badan kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Muara Komam	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kerjasama dibidang pemberdayaan masyarakat dengan unit usaha yang dilakukan simpan pinjam ✓ Deviden hasil usaha digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Jenis Program kerja yang dilaksanakan yaitumemberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin
			2. Prayon		
			3. Long Sayo		
		Bengalon	1. Sekerat		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keuangan Mikro Perdesaan Exs PNPM-PD (Simpan Pinjam)

Tabel 7
Pendamping Desa Yang Dibina
Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Lokasi	Kabupaten
1	Buinsar Albert Tua Siagian	PDP	Kec. Damai	Kutai Barat
2	Herliana Wati	PDP	Kec. Bongan	Kutai Barat
3	Abdul Afif Ihsan	PDP	Kec. Penyinggahan	Kutai Barat
4	Yones Efendi	PDP	Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
5	Christivel Pasaribu, SIP	PDP	Kec. Tering	Kutai Barat
6	Anastasya Yeni	PLD	Kec. Damai	Kutai Barat
7	Norbaiti Ht	PLD	Kec. Bongan	Kutai Barat
8	Roby Irwan Subhan	PLD	Kec. Penyinggahan	Kutai Barat
9	Feldi Rogi	PLD	Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
10	Deri Susanto	PLD	Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
11	Lina Wati	PLD	Kec. Tering	Kutai Barat



12	Irwan	PD	Kec. Atelen	kutai Timur
13	Ahmad Sodikin	PD	Kec. Bengalon	Kutai Timur
14	Gazali Rahman	PD	Kec. Karang	Kutai Timur
15	Aditya Sandi	PD	Kec. Batu Ampar	Kutai Timur
16	Muhammad Usman	PD	Kec. Sandaran	Kutai Timur
17	Atik Syafial	PLD	Kec. Sekerat & Sepaso Selatan	Kutai Timur
18	Gusti	PLD	Kec. Tebangan Lembak	Kutai Timur
19	Tengku Adil	PLD	Kec. Baay & Batu Lepoq	Kutai Timur
20	Atik	PLD	Kec. Lung Melah	Kutai Timur
21	Dewi Sapitri	PLD	Kec. Lung Melah	Kutai Timur
22	Agus Sopian	PLD	Kec. Himba Lestari	Kutai Timur
23	Fahri Husain	PDTI	Kec. Derawan	Berau
24	Ahmad Sahlaidi	PDP	Kec. Talisayan	Berau
25	Novelli Tampubolon	PDTI	Kec. Biatan	Berau
26	Nur Sya'baniah	PDTI	Kec. Gunung Tabur	Berau
27	Saipul	PDTI	Kec. Segah	Berau
28	Tanti W.Galih	PDTI	Kec. Batu Putih	Berau
29	Asma Zulfetri	PDTI	Kec. Teluk Bayur	Berau
30	Ulil Amri	PD	Kec. Tabalar	Berau
31	Riadil Hamda	PDP	Kec. Sambaliung	Berau
32	Riri Lawan	PDP	Kec. Batu Putih	Berau
33	Nur Alam	PDP	Kec. Biduk-Biduk	Berau
34	Syamsul Bahri	PDTI	Kec. Sambaliung	Berau
35	Zainal Abidin	PLD	Kec. Tabalar	Berau
36	Desi Rianawati	PLD	Kec. Kelay	Berau
37	Fenny Setyarini	PLD	Kec. Sambaliung	Berau
38	Trida Oktavianto	PLD	Kec. Kelay	Berau
39	Jhony	PLD	Kec. Segah	Berau
40	Sahrudin	PDP	Kec. Long Kali	Paser
41	Ahmad Fahrul Rozi	PDP	Kec. Tanjung Harapan	Paser
42	Busroni	PLD	Kec. Batu Sopang	Paser
43	Ika Pranita Sofyani	PLD	Kec. Tanah Grogot	Paser
44	Haidir	PDP	Kec. Long Ikis	Paser
45	Wahyudi	PLD	Kec. Muara Komam	Paser
46	Adriani Panangan	PDTI	Kec. Kuaru	Paser
47	Mei Dita N	PDP	Kec. Kuaru	Paser
48	Tri Wahyuningsih	PLD	Kec. Long Ikis	Paser
49	Ita Iriani	PLD	Kec. Long Ikis	Paser



50	Indah Saraswati	PDTI	Kec. Long Ikis	Paser
51	Ariyanto Setiawan	PDTI	Kec. Muara Komam	Paser
52	Darwansa	PLD	Kec. Muara Komam	Paser
53	Siti Rohmah	PLD	Kec. Waru	PPU
54	Irmah	PLD	Kec. Sepaku	PPU
55	Luluk Munawaroh	PD	Kec. Babulu	PPU
56				
57	Junaidi	PDP	Kec. Sepaku	PPU
58	Eviani	PLD	Kec. Penajam	PPU
59	Teguh Purwadi	PDTI	Kec. Waru	PPU
60	Edy Santoso	PLD	Kec. Sepaku	PPU
61	Mutijo	PLD	Kec. Babulu	PPU
62	Abdul Aziz	PLD	Kec. Sepaku	PPU
63	Suharti	PLD	Kec. Babulu	PPU
64	Ramang	TAPP		PPU
65	Anam Syahroji Surya P	TAPMD		PPU
66	Yoga Prasetya Adi	TAPP		Maluhu
67	Sofian	PDP	Kec. Laham	Maluhu
68	Abdul Gahar	PDTI	Kec. Laham	Maluhu
69	Liber	PLD	Kec. Laham	Maluhu
70	Dwi Setyo Utomo	TAPMD		Maluhu
71	Nurmansah	PLD	Ling Hurai	Maluhu
72	Lung Wari	PLD	Danun Paroy	Maluhu
73	Partogian Sinaga	TAPM		Kukar
74	Henry Irawan	TA P3MD		Kukar
75	Titah	PD		Kukar
76	Darsono	PLD		Kukar
77	Wahyu S	PD		Kukar
78	Samsul Arifin	PD		Kukar
79	Adi Sucipto	PD		Kukar
80	Suriati	PLD		Kukar
81	Laila Reafiani	PLD		Kukar
82	Huri Arti	PD		Kukar
83	M. Kirmani	PLD		Kukar
84	Sukiman	PLD		Kukar
85	Shaiful	PD		Kukar
86	Herlina Wati	PD		Kukar
87	Ahmad Junaidi	PLD		Kukar
88	Huda W	PLD		Kukar
89	Arif R	TA P3MD		Kukar
90	Meidy Parangin Angin	TAPM		Kukar



semua target kinerja untuk kegiatan pengungkit Indikator Kinerja Persentase Desa dengan status berkembang dapat tercapai secara persentase 90%.

- Keberhasilan/Kegagalan :
 1. Terlaksananya Penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan perdesaan Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Terlaksananya rapat-rapat intern dan koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui rapat Intern terbatas dan webinar
 3. Terhimpunya data identifikasi pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, Data Badan Kerjasama Antar Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesa) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) terlampir.
 4. Terhimpunya data dan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi/BUMN/BUMD/Swasta dan Pihak lainnya.
 5. Terhimpunya data pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan
 6. Tercapainya laporan pengembangan dan Monitoring, Pembangunan Kawasan Perdesaan di 3 (Tiga) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Berau
 7. Tersampainya Informasi tentang pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Media Website, cetak dan Elektronik.

- Peningkatan/Penurunan
 1. Di wilayah Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan sarana - prasarana belum memadai dalam membantu pelaksanaan program pembangunan kawasan
 2. Belum dilaksanakan penataan batas Wilayah Administrasi
 3. Sinkronisasi OPD dan multi stakeholder terkait status bahan belum maksimal
 4. Pemetaan Wilayah pembangunan Kawasan Perdesaan belum ada.
 5. Belum pernah dilakukannya identifikasi potensi dan pengembangan kawasan perdesaan
 6. Belum aktifnya Koordinasi pembangunan kawasan perdesaan di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

- Alternatif/Solusi
 1. Diperlukan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten/Kota yang lebih besar untuk membuka akses jaringan dan menjadi suatu keharusan.
 2. Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi harus segera dibentuk dalam upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten.
 3. Perlu dilaksanakan FGD dengan pihak terkait dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan
 4. Segera dilakukan pemetaan wilayah pembangunan kawasan perdesaan



5. Akan dilakukan identifikasi pengumpulan data dan informasi terkait potensi dan pengembangan kawasan perdesaan

4. Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan, sesuai dengan Target RPJMD DPMPD Prov.Kaltim Tahun 2020 adalah 30 Desa. Berada di Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan desa
 - Fasilitasi pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Fasilitasi Peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
2. Program Penataan Desa
 - c. Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan kelembagaan, Pengisian jabatan, dan masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
 - Fasilitasi Kabupaten Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa

Adapun data capaian Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan sebagai berikut :

Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 140/239/Pemdeskel perihal Pelatihan Aparatur Desa Tahun Anggaran 2021, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan melakukan fungsi pembinaan berupa pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Aparatur Desa dengan Peserta sesuai dengan target IDM 30 (tiga puluh) Desa/Kampung sangat tertinggal dan tertinggal, sebanyak 30 (tiga puluh) orang Aparatur Desa dan Anggota BPD

Tabel 8
Aparatur Desa yang berhasil dilatih
Tahun 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Paser	Muara Samu Muara Samu Muara Samu Muara Samu	Luan Libur Dinding Biu Suweto



		Muara Komam Muara Komam Muara Komam	Long sayo Prayon Binagon
2	Kutai Kartanegara	Muara Kaman Kota Bangun Marang Kayu Kota Bangu Loa Kulu	Menamang Kiri Sedulang Sambera Wonosari Jonggon
3	Kutai Timur	Telen Bengalon Bengalon Bengalon Karangan Karangan Batu Ampar	Lung Melan Sekerat Sepaso Selatan Tebangan Lembak Batu Lepoq Baay Himba Lestari
4	Kutai Barat	Penyinggahan Damai Bongan Bongan Mook Manaar Bulatn Mook Manaar Bulatn Tering	Bakung Lumpat Dahuq Siram Jaya Siram Makmur Linggang Muara Batuq Muyub Ulu Tondoh
5	Mahulu	Long pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Hubung	Delang Long Pakaq Lirung Ubing Long Hubung

Tabel 9
Anggota BPD/K yang berhasil dilatih
Tahun 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	BPD
1	Paser	Muara Samu Muara Samu Muara Samu Muara Samu Muara Komam Muara Komam Muara Komam	Luan Libur Dinding Biu Suweto Long sayo Prayon Binagon
2	Kutai Kartanegara	Muara Kaman Kota Bangun Marang Kayu Kota Bangu Loa Kulu	Menamang Kiri Sedulang Sambera Wonosari Jonggon
3	Kutai Timur	Telen	Lung Melan



		Bengalon Bengalon Bengalon Karangan Karangan Batu Ampar	Sekerat Sepaso Selatan Tebangan Lembak Batu Lepoq Baay Himba Lestari
4	Kutai Barat	Penyinggahan Damai Bongan Bongan Mook Manaar Bulatn Mook Manaar Bulatn Tering	Bakung Lumpat Dahuq Siram Jaya Siram Makmur Linggang Muara Batuq Muyub Ulu Tondoh
5	Mahulu	Long pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Hubung	Delang Long Pakaq Lirung Ubing Long Hubung

Tabel 10
Juara Lomba Desa/Kampung Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

No	Juara	Desa/Kampung	Kecamatan	Kabupaten
1	I	Sumber Agung	Batu Putih	Berau
2	II	Bukit Raya	Sepaku	Penajam Paser Utara
3	III	Segendang	Batu Engau	Paser

- Keberhasilan/Kegagalan :
 1. Dari 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah secara keseluruhan telah terlaksana.
 2. Sesuai dengan Target IDM Tahun 2021 sebanyak 30 Desa yang harus ditingkatkan status desanya menjadi berkembang, melalui Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan, telah melaksanakan Pembinaan ataupun Pelatihan kepada Aparatur Desa dan Anggota BPD/Kampung masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) orang Aparatur Desa dan Anggota BPD/Kampung
 3. Telah terlaksana lomba Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
 4. Untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa, dalam hal ini penyelenggaraan lomba Inovasi Perkembangan Desa/Kampung, Kelurahan dibatalkan pelaksanaannya, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/4665/SJ, 26 Agustus 2021 (terlampir) disampaikan perihal Pembatalan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat



Regional Tahun 2021, dikarenakan Pencegahan penyebaran Covid-19 dan relokasi anggaran pada Direktorat Bina Pemerintahan Desa.

- Peningkatan/Penurunan
 1. Terjadi Peningkatan dimana pada Tahun 2020 pelaksanaan Lomba Desa/Kampung, Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tidak tercapai dikarenakan adanya refocusing anggaran maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan, selain itu juga menyusun dengan dikeluarkannya Surat dari Kemendagri No. 414.4/2777 tentang Pembatalan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2020, dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 414.4/2421/DPMPD tentang Pembatalan Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa/kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2020. Untuk Tahun 2021 Lomba Desa/Kampung, Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dapat terselenggara dengan baik.
 2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD, sehingga pelaksanaan pelatihan belum bisa menyentuh semua Pemerintah Desa dan BPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang keseluruhan berjumlah 841 Desa.

- Alternatif/Solusi
 1. Perlu adanya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Prov.Kaltim dalam hal ini DPMPD Prov.Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini DPMD Kabupaten untuk membatasi Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga non Pemerintah, dan harus memperhatikan dari segi materi/modul pelatihan dan pelatih yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
 2. Menjalin sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa dan BPD dalam hal pendanaan, pemenuhan pelatih yang memiliki kompetensi yang bersertifikasi, modul/materi yang sudah standar, dan ketentuan atau syarat-syarat lain yang ditetapkan untuk Pemerintah Desa dan BPD (Contoh : Desa tertinggal dan sangat tertinggal, Kepala Desa dan BPD yang baru dilantik namun belum dilakukan peningkatan Kapasitas Desa).
 3. Menganggarkan kembali kedepannya di tahun 2022 untuk kegiatan Lomba Penyelenggaraan lomba Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan, Lomba Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2022, serta lomba Desa/kampung yang mengikuti Inovasi perkembangan Desa sebagai salah satu kegiatan untuk pengungkit dari indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan.



4. **Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif**, Indikator ini berada di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, diungkit dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) Sub kegiatan :
1. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Keluarga
 4. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat

Sesuai dengan Target IDM Tahun 2021 sebanyak 30 Desa yang harus dinaikan statusnya menjadi berkembang untuk Indikator kinerja ini secara program telah tercapai. Adapun data untuk mencapai indikator kinerja ini diperlukan data target LKD yang harus dicapai sebagai berikut :

Tabel 11
Target dan Realisasi LKD tahun 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	LKD Tercapai
1	Paser	Batu Sopang	Rantau Buta	Posyandu, PKK
2	Paser	Long Kali	Kepala Telake	Posyandu
3	Paser	Long Kali	Muara Adang II	Posyandu
4	Paser	Muara Samu	Muara Andeh	Posyandu, PKK
5	Paser	Muara Samu	Rantau Bintungan	Posyandu, PKK
6	Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Benua Baru	Posyandu, PKK
7	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Tunjungan	Posyandu, PKK
8	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Menamang Kiri	Posyandu, PKK
9	Kutai Kartanegara	Tabang	Muara Kebaq	Posyandu, Karang Taruna



10	Kutai Kartanegara	Marang Kayu	Santan Tengah	Posyandu, PKK
11	Berau	Kelay	Mapulu	Posyandu, Karang Taruna, PKK
12	Kutai Barat	Bongan	Pereng Taliq	PKK, Posyandu
13	Kutai Barat	Bongan	Tanjung Soke	Posyandu
14	Kutai Barat	Bentian Besar	Anan Jaya	Posyandu
15	Kutai Barat	Tering	Linggang Muyub Ilir	Posyandu, PKK
16	Kutai Barat	Muara Pahu	Jerang dayak	Posyandu, Karang Taruna
17	Kutai Barat	Muara Pahu	Mendung	Posyandu, Karang Taruna
18	Kutai Timur	Muara Ancalong	Muara Dun	LPM, PKK, Karang Taruna
19	Kutai Timur	Muara Ancalong	Teluk Baru	Posyandu, LPM
20	Kutai Timur	Muara Ancalong	Long Nah	Posyandu
21	Kutai Timur	Telen	Long Noran	Posyandu, LPM, PKK
22	Kutai Timur	Batu Ampar	Mugi Rahayu	LPM, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat
23	Kutai Timur	Bengalon	Tebangan Lembak	Posyandu
24	Mahakam Ulu	Long Bagun	Long Hurai	Posyandu
25	Mahakam Ulu	Long Hubung	Sirau	Posyandu
26	Mahakam Ulu	Long Hubung	Long Hubung Ulu	Posyandu, Karang Taruna, PKK
27	Mahakam Ulu	Long Apari	Naha Buan	PKK, Posyandu, LPM, Lembaga Adat
28	Mahakam Ulu	Long Apari	Naha Tifab	PKK, Posyandu, LPM, Lembaga Adat
29	Mahakam Ulu	Long Apari	Naha Silat	PKK, Posyandu, LPM, Lembaga Adat
30	Mahakam Ulu	Long Apari	Long Apari	PKK, Posyandu, LPM, Lembaga Adat

Selain itu sebagai pengungkit kegiatannya lainnya guna meningkatkan presentasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif yaitu Pengembangan Kapasitas Masyarakat yang di tahun 2021 di targetkan pembinaan sebanyak 150 Kader Pemberdayaan Masyarakat di 4 (Empat) Kab/Kota yaitu Berau, Penajam paser Utara, paser dan Samarinda dengan data capaian sebagai berikut :

Tabel 12
Target dan Realisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang telah mendapatkan Pembinaan di Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Unsur peserta		Pelatihan KPM
1	Berau	48	LPM, Pokja, Posyandu, KPM	Bimbingan Teknis



		orang	BPD,TPP, Unsur Kecamatan	Kaderisasi Masyarakat Tentang Pendampingan Desa dan Kelurahan
2	Penajam Paser Utara	42 orang	KPM,TPP,Perangkat Desa	Bimbingan Teknis Kaderisasi Masyarakat Tentang Pendampingan Desa dan Kelurahan
3	Paser	51 orang	Unsur Kecamatan, KPM,LPM,TPP,Perangkat Desa	Bimbingan Teknis Kaderisasi Masyarakat Tentang Pendampingan Desa dan Kelurahan
4	Samarinda	52 orang	LPM,Petani Milenial Kaltim, Unsur DPMD/K Kab/Kota,KPM	Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat

pengungkit kegiatannya lainnya guna meningkatkan presentasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif yaitu Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat yang di tahun 2021 di targetkan pembinaan sebanyak 5 MHA dengan data capaian sebagai berikut :

Tabel 13
Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Ket
	Paser	Muara Komam	Swan Slutung/Kampung Muly	Sk Bupati 413.3/KEP-268/2018 Tahap Pembinaan Tahun 2021
1	Berau	Batu Putih	Kampung Tembudan	Tahap Pembinaan
2	Kutai Timur	Bengalon	Desa Keraitan	
3	Mahakam Ulu	Long Hubung	Kampung Memahak Teboq	



4	Kutai Barat	Nyuatan	Kampung Sembuan	Tahun 2021
5	Kutai Barat	Bentian Besar	Penarong	

- Keberhasilan/Kegagalan
 1. Tahun 2021 melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, melalui data target LKD,Pembinaan KPM, dan Pembinaan MHA tercapai 100 %
 2. Indikator ini dilaksanakan melalui pelaksanaan dan Pembinaan BBGRM, Pembinaan PKK, Pembinaan LPM Pembinaan Posyandu,Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
 3. Untuk Tahun 2021 kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat yang di targetkan pembinaan sebanyak 150 Kader Pemberdayaan Masyarakat di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Berau, Penajam Paser Utara, Paser dan Samarinda terealisasi lebih dari yang ditargetkan sebanyak 193 KPM sesuai dengan yang ditargetkan secara persentase tercapai 100%
 4. Keberhasilan Tahun 2021 sesuai dengan data, Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sesuai regulasi ada dua MHA yaitu MHA Muluy dan MHA Paring Sumpit
 5. Dari Target MHA yang ditetapkan tahun 2021 sebanyak 7 MHA hanya tercapai 5 MHA dikarenakan beberapa hal diantaranya Kurangnya Peran dari Kabupaten , peran Kepala Desa dalam memberikan perhatian kepada Masyarakat Adat, Pemahaman Pemerintah Kabupaten tentang tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan Perlindungan dan Pengakuan MHA, belum sepenuhnya dimengerti, Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar OPD di Kabaupaten tentang pengurusan pembentukan MHA, Dinas Lingkungan Hidup dan DPMD/K Kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Kutai Barat adanya pengesahan MHA tanpa koordinasi kepada DPMK, dan hal merupakan salah satu penyebab tidak validnya data MHA.
- Peningkatan/Penurunan
 1. Kurangnya Pembinaan PKK yang berkesinambungan dari Provinsi, kabupaten, Kota dan Kecamatan.
 2. Tidak ada alokasi khusus dari Kabupaten /Kota untuk penilaian BBGRM
 3. Telah terjadi peningkatan Pelatihan terkait dengan tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat



4. Kurangnya pemahaman Kab/Kota terkait dengan kinerja,keberadaan,serta peran dan Fungsi KPM,
 5. Masih rendahnya tingkat pemahaman Aparatur Desa terkait dengan Masyarakat Hukum Adat .
 6. Kurangya anggaran terkait MHA
- Alternatif/Solusi
 1. Perlu adanya Pembinaan PKK yang berkesinambungan dari Provinsi, kabupaten, Kota dan Kecamatan.
 2. Kabupaten/Kota agar mengalokasikan anggaran untuk penilaian BBGRM
 3. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan terkait dengan tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat
 4. Meningkatkan koordinasi dengan jajaran Kab/Kota terkait dengan kinerja KPM, tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa
 5. Mengadakan Sosialisasi ditingkat Kabupaten yang melibatkan OPD terkait dan LSM untuk memberikan pemahaman terkait dengan Masyarakat Hukum Adat .
 6. Perlu dilakukan Penguatan kepada kepala Desa dan lembaga Adat serta masyarakat Adat
 7. Perlu adanya pembentukan tim percepatan perlindungan dan pengakuan MHA ditingkat Provinsi guna memfasilitasi Kabupaten untuk melakukan penetapan MHA
 8. Perlu adanya Bankeu khusus terkait MHA
 9. Agar keberadaan MHA dapat diketahui oleh khalayak luas, dapat didokumentasikan dan dipublikasikan di Media, maka perlu adanya peningkatan dukungan anggaran.

6. **Indikator Kinerja Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim**, Indikator ini berada di Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat , Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna., diungkit dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa melalui Sub Fasilitas Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa. Adapun data Target dan realisasi Desa /Kampung Iklim yang terbentuk sebagai berikut :

Tabel 14
Target dan Realisasi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim yang terbentuk Tahun 2021

No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Sedulang	Kota Bangun	Kutai Kartanegara
2	Wonosari	Kota Bangun	Kutai Kartanegara
3	Sambera Baru	Marangkayu	Kutai Kartanegara
4	Jonggon Desa	Loa Kulu	Kutai Kartanegara
5	Menamang Kiri	Muara Muntai	Kutai Kartanegara



6	Tembangan Lembak	Bengalon	Kutai Timur
7	Sepaso Selatan	Bengalon	Kutai Timur
8	Sekerat	Bengalon	Kutai Timur
9	Lung Melan	Telen	Kutai Timur
10	Batu Lepoq	Karangan	Kutai Timur
11	Baay	Karangan	Kutai Timur
12	Himba Lestari	Batu Ampar	Kutai Timur
13	Luan	Muara Samu	Paser
14	Biu	Muara Samu	Paser
15	Libur Dinding	Muara Samu	Paser
16	Suweto	Muara Samu	Paser
17	Long Sayo	Muara Komam	Paser
18	Prayon	Muara Komam	Paser
19	Binangon	Muara Komam	Paser
20	Linggang Muara Batuq	Mook Manaar Bulant	Kutai Barat
21	Tondoh	Mook Manaar Bulant	Kutai Barat
22	Bakung	Penyinggahan	Kutai Barat
23	Lumpat Dahuq	Damai	Kutai Barat
24	Siram Jaya	Bongan	Kutai Barat
25	Siram Makmur	Bongan	Kutai Barat
26	Muyub Ulu	Tering	Kutai Barat
27	Delang Kerohong	Long Pahagai	Mahakam Ulu
28	Long Pakaq Baru	Long Pahagai	Mahakam Ulu
29	Lirung Ubing	Long Pahagai	Mahakam Ulu
30	Long Hubung	Long Hubung Ulu	Mahakam Ulu
31	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Balikpapan
32	Kelurahan Kariangau	Balikpapan Barat	Balikpapan
33	Keluarahan Pemaluan	Sepaku	Penajam Paser Utara
34	Keluarahan Riko	Penajam	Penajam Paser Utara
35	Keluarahan Mentawir	Sepaku	Penajam Paser Utara

Untuk tahun 2021 Persentase Desa/Kampung/Kelurahan yang menjadi Kampung Iklim terlaksana dengan melaksanakan Sosialisasi Program Kampung Iklim yang bertujuan meningkatkan Indeks Desa Membangun menuju Desa/Kampung/Kelurahan rendah emisi.

• Keberhasilan/Kegagalan

1. Untuk Indikator Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim Tahun 2021 sebanyak 35 Desa/Kampung/Kelurahan, terealisasi di 33 Desa dan 2 (dua) Kelurahan secara persentase terealisasi 100 %.
2. Salah satu faktor penyebab berhasilnya capaian target yang ditetapkan antara lain melakukan koordinasi dan evaluasi di Desa/Kampung/Kelurahan Iklim yang merupakan program sinergi aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta



meningkatnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain diberbagai pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama di desa.

- Peningkatan/Penurunan
 1. Terjadi peningkatan untuk tahun 2021 terealisasi 100 %
 2. Sosialisasi Kampung Iklim yang dilaksanakan oleh DPMPD Prov.Kaltim di tahun 2021 tidak hanya di wilayah perdesaan saja tetapi juga tersosialisasi di wilayah Kelurahan.

- Alternatif/Solusi
 1. Untuk tahun berikutnya atau yang akan datang tetap dilaksanakan Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Lainnya, dan diharapkan tidak hanya kegiatan Sosialisasi saja tetapi juga kegiatan lainnya tentunya hal ini juga perlu adanya dukungan anggaran.
 2. Membentuk team work dengan melibatkan usur opd terkait baik Provinsi maupun Kabupaten guna meningkatkan status Indeks Desa Membangun menuju Desa/Kampung/Kelurahan rendah emisi.
 3. Terus melakukan koordinasi dan evaluasi di Desa/kampung/Kelurahan Iklim dalam bentuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembagian manfaat Program FCPF-CF
 4. Melaksanakan bimbingan Teknis Pengisian Data melalui Portal MMR bagi Desa /Kampung/Kelurahan yang memberikan persetujuan atas data Kampung Iklim (PADIATAPA).

- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	90.00	93.97	3.97



D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	30	27	90	19.898.636.000,-	18.425.133.203,-	92,59

2. Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14,276,220,500	13,150,723,561	92.12	
	<i>1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>735,000,000</i>	<i>711,702,430</i>	<i>96.83</i>	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	276,000,000	275,808,175	99.93	
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	25,000,000	24,849,300	99.40	
	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	25,000,000	24,669,600	98.68	
	4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	25,000,000	24,975,200	99.90	
	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	25,000,000	24,604,450	98.42	
	6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	49,558,000	99.12	
	7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309,000,000	287,237,705	92.96	
	<i>2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>9,420,378,000</i>	<i>8,454,050,576</i>	<i>89.74</i>	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,885,298,000	7,935,655,673	89.31	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	349,680,000	333,620,000	95.41	
	3 Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	34,000,000	33,850,000	99.56	



4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	69,000,000	68,880,073	99.83
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	57,400,000	57,231,030	99.71
6	Sub Kegiatan Pengelolaam dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000	9,932,000	99.32
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000	9,899,800	99.00
8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,000,000	4,982,000	99.64
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,000,000	71,990,969	85.70
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84,000,000	71,990,969	85.70
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,325,323,608	1,305,721,717	98.52
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4,021,608	3,967,500	98.65
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	372,862,000	361,557,708	96.97
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,000,000	6,000,000	100.00
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218,440,000	210,303,149	96.28
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,000,000	27,994,500	99.98
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	696,000,000	695,898,860	99.99
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240,020,000	234,700,000	97.78
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,020,000	215,200,000	97.81
2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	20,000,000	19,500,000	97.50
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,158,354,792	2,070,398,365	95.92
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,885,000	97.70
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353,120,000	295,825,405	83.77
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301,457,960	294,830,500	97.80
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,498,776,832	1,474,857,460	98.40
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313,144,100	302,159,504	96.49
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	100,000,000	96,982,370	96.98



	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14,220,100	6,672,264	46.92	
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198,924,000	198,504,870	99.79	
2	Program Penataan Desa	83,700,000	83,477,346	99.73	
	<i>1 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</i>	<i>83,700,000</i>	<i>83,477,346</i>	<i>99.73</i>	
	1 Sub Kegiatan Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	83,700,000	83,477,346	99.73	
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	819,600,000	624,712,927	76.22	
	<i>1 Fasilitas Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi</i>	<i>819,600,000</i>	<i>624,712,927</i>	<i>76.22</i>	
	1 Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	675,594,000	512,974,927	75.93	
	2 Sub Kegiatan Fasilitas kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	50,000,000	43,653,800	87.31	
	3 Sub Kegiatan fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	94,006,000	68,084,200	72.43	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,699,649,500	1,681,199,362	98.91	
	<i>1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<i>1,699,649,500</i>	<i>1,681,199,362</i>	<i>98.91</i>	
	1 Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	127,350,000	127,222,368	99.90	
	2 Sub Kegiatan Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa	88,200,000	88,021,629	99.80	
	3 Sub Kegiatan Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	9,500,000	9,032,000	95.07	
	4 Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4,950,000	4,950,000	100.00	
	5 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	49,425,000	49,168,702	99.48	
	6 Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	21,700,000	21,586,243	99.48	



7	Sub Kegiatan fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	430,000,000	422,064,000	98.15
8	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	152,075,000	151,702,343	99.75
9	Sub Kegiatan Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,000,000	16,019,889	89.00
10	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	180,375,000	179,169,751	99.33
11	Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	9,500,000	9,500,000	100.00
12	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	160,825,000	159,724,425	99.32
13	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	447,749,500	443,038,012	98.95
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3,019,466,000	2,885,020,007	95.55
<i>1</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>3,019,466,000</i>	<i>2,885,020,007</i>	<i>95.55</i>
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	53,200,000	51,508,396	96.82
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	347,600,000	304,193,900	87.51
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	200,000,000	186,101,660	93.05
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM dan Karang taruna,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum Adat	194,000,000	191,471,543	98.70



5	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	1,793,906,000	1,737,371,698	96.85	
6	Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	198,220,000	189,890,410	95.80	
7	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang taruna)Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	232,540,000	224,482,400	96.53	
JUMLAH ANGGARAN		19,898,636,000	18,425,133,203	92.59	



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Indikator Kinerja Utama, dilaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, baik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas maupun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pengungkit lainnya sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dari hasil Analisis Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Secara umum Tahun 2021 DPMPD Prov.Kaltim sesuai dengan target kinerja sebanyak 30 Desa dengan status Tertinggal dan sangat tertinggal yang harus dinaikan statusnya menjadi berkembang hanya tercapai 27 Desa, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:
 - Postur Anggaran yang minim
 - Susahnya Aksesibilitas menuju desa (jalan, listrik, telekomunikasi dll)
 - Belum meratanya kualitas pembangunan di wilayah perdesaan.
 - Kurangnya Sinergitas antar OPD Terkait, karena untuk menaikkan status IDM suatu Desa tidak hanya kerja dari DPMPD saja, tetapi perlu peran aktif dari OPD terkait
 - Indikator penilaian IDM bertumpu pada Indikator Kemendes PDDT RI yang seluruh Indonesia diberlakukan sama sehingga untuk mengukur kemampuan menaikkan status desa sangat susah, untuk itu DPMPD Provinsi Kaltim harus memiliki Indikator Penilaian IDM tersendiri menyesuaikan dengan kondisi geografis Desa di Kalimantan Timur.
2. Disisi lain untuk pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama BUMDesa Aktif untuk tahun 2021 DPMPD Prov.Kaltim telah melakukan upaya melalui peningkatan pembinaan dan monitoring dan tercapai sebanyak 30 BUMDesa/Kampung. Peran serta dari BUMDesa/Kampung sangat diperlukan guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat diperdesaan.
3. Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan status Desa Berkembang dari target 30 Desa yang ditetapkan hanya tercapai 27 Desa, hal ini dikarenakan, dari hasil



analisis 3 Desa yang tidak naik statusnya menjadi desa berkembang dikarenakan dari perhitungan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan bahwa nilai komposit Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) berada dirata rata dinilai 0,5375, 0,5729 dan 0,5965 sedangkan untuk skor yang diperlukan ditahun 2021 untuk menaikkan status IDM adalah 0,6770.

4. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan sesuai dengan target IDM di 30 Desa secara keseluruhan tercapai melalui Peningkatan pembinaan pelatihan Aparatur Desa dan BPD/Kampung masing-masing sebanyak 30 Orang.
5. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif juga tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di 30 Desa melalui LKdnya
6. Untuk Indikator Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim, tahun 2021 mengacu ke permendagri 90 Tahun 2019 berada di Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dengan indikator kinerja jumlah desa/kelurahan iklim dengan target 35 Desa/Kampung/Kelurahan dan tercapai sebanyak 33 Desa dan 2 Kelurahan. Keberhasilan indikator ini dilakukan melalui upaya koordinasi dan evaluasi di Desa/Kampung/Kelurahan Iklim yang merupakan program sinergi aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). selain itu adanya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain guna meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat terutama di desa.

B. Saran

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPMPD guna meningkatkan capaian kinerja ditahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. 3 Desa yang tidak naik statusnya ditahun 2021 tentunya menjadi PR bagi DPMPD Prov.Kaltim yang harus diselesaikan ditahun berikutnya dan tentunya harus ada upaya upaya yang dilakukan, diantaranya
 - Melakukan upaya Sinergitas antar OPD Terkait, karena untuk menaikkan status IDM suatu Desa tidaklah mudah dan perlu Sinergitas dengan OPD terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten.
 - DPMPD Provinsi Kaltim harus memiliki Indikator Penilaian IDM tersendiri menyesuaikan dengan kondisi geografis Desa di Kalimantan Timur, dengan tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kemendes PDTT RI.



- Harus ada sosialisasi baik di Provinsi maupun Kabupaten terkait bagaimana pengisian ataupun penilaian Indikator IDM.
- 2. Peran serta dari BUMDesa/Kampung sangat diperlukan guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat di perdesaan, untuk itu perlu adanya reward kepada BUMDesa/Kampung yang aktif dalam berbagai jenis usahanya. Selain itu harus ada sosialisasi ataupun pelatihan kepada BUMDesa aktif untuk naik lagi peringkatnya menjadi BUMDesa berkembang ataupun BUMDes Bersama sesuai dengan skala Nasional.
- 3. Nilai komposit Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dari 3 Desa yang masih tertinggal, yang masih berada dirata rata dinilai 0,5375, 0,5729 dan 0,5965 untuk tahun berikutnya harus mampu berada di score 0,6770, untuk itu perlu upaya inovasi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan guna menaikkan status IDM, salah satunya adanya dukungan anggaran guna memberikan bantuan fisik langsung yang diperlukan oleh desa tersebut, selain itu juga perlu upaya Pemerintah untuk mengembangkan potensi Desa seperti pengembangan Potensi Desa Wisata.
- 4. Peningkatan pembinaan pelatihan Aparatur Desa dan BPD/Kampung setiap tahunnya harus terus ditingkatkan guna meningkatkan kapasitas SDM Aparatur yang ada di desa. Diharapkan kedepannya ada pemberian reward bagi Aparatur Desa yang mampu meningkatkan status Desanya.
- 5. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif juga tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di 30 Desa melalui LKDNya, dan kedepannya diharapkan peran dan fungsi LKD lainnya dalam hal ini, peran KPM, LPM, PKK, Karang Taruna harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten guna meningkatkan status IDM.
- 6. Kedepannya untuk Program Kampung Iklim harus terus melakukan koordinasi dan evaluasi di Desa/kampung/Kelurahan Iklim melalui kegiatan sosialisasi pembagian manfaat Program FCPF-CF, dan bimbingan Teknis Pengisian Data melalui Portal MMR bagi Desa /Kampung/Kelurahan yang memberikan persetujuan atas data Kampung Iklim (PADIATAPA).

Samarinda, 2022

Kepala,

H.M. Syirajudin, SH, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja setiap tahunnya akan diukur melalui target kinerja yang telah ditetapkan. Dari Pengukuran target kinerja tersebut akan terlihat seberapa jauh realisasi kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang selama tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah.

Untuk tahun 2021 kinerja yang dinilai dalam LkjIP berjumlah 6 (Enam) indikator kinerja utama yang diungkit dengan 5 (lima) program 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 55 (lima Puluh lima) sub kegiatan, dengan nilai capaian sasaran kinerja rata-rata sebesar 90.00 %.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan Indikator kinerja terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target, namun dapat diatasi dengan baik sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan, dengan melakukan strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau pencapaian target yang maksimal.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Samarinda, 2022

Kepala,

H.M. Syirajudin, SH, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	3
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	6
G. Sarana dan Prasarana Kerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	19
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	25
C. Analisis Capaian Kinerja	27
D. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**